

BAB II

INVASI IRAK TERHADAP KUWAIT

Invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB yang telah disepakati bersama. Tindakan Irak itu sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional dalam situasi lingkungan internasional yang relatif aman dan stabil, walaupun di beberapa bagian dunia masih terjadi konflik. Tindakan agresi militer Irak itu sangat mengejutkan dan mendapat kecaman keras dari negara-negara di dunia termasuk PBB. Oleh sebab itu Bab ini akan menganalisis lebih mendalam dan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait.

A. Latar Belakang Invasi Irak terhadap Kuwait.

Sejarah Irak masa lalu mengawali penjelasan latar belakang konflik yang terjadi anatar Irak dan Kuwait yang diakhiri dengan invasi Irak terhadap Kuwait. Hal penting juga dibahas dalam latar belakang invasi Irak terhadap Kuwait adalah masalah ekonomi yang dihadapi Irak setelah selesainya perang dengan Iran. Perekonomian dan ifrastruktur Irak mengalami kehancuran yang membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan dan merekonstruksinya. Itulah sebabnya Irak meminta bantuan kepada negara-negara Arab khususnya kepada Arab Saudi dan Kuwait, namun permintaan Irak ditolak. Disamping itu ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak juga akan dibahas disini sebagai faktor pendorong terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait.

1. Latar Belakang Sejarah

Pada tahun 638 Mesopotamia yang saat ini dikenal sebagai Irak diduduki dan diambilalih dari Kekaisaran Sasanian Persia oleh bangsa Arab dari Jazirah Arab dan rakyat di wilayah itu dijadikan beragama Islam. Pada tahun 750 bangsa Arab membangun Kekhalifahan Abbasiyah dan menentukan Bagdad sebagai ibukotanya. Dari kota Bagdad inilah kekuasaan Dinasti Abbasiyah mengembangkan kekuasaannya dari Asia Tengah hingga Sepanyol. Dalam era

ini selain terjadi kemajuan di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, juga terjadi intrik-intrik politik dan perebutan kekuasaan. Lebih dari 80 dari 92 Khalifah yang terbunuh dalam perebutan kekuasaan di Mesopotamia. Kekuasaan Dinasti Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 ketika Bagdad diduduki oleh bangsa Mongolia dibawah pimpinan Hulagu, cucunya Gengish Khan, yang menghancurkan bendungan Sungai Tigris dan menenggelamkan banyak penduduk Mesopotamia. Pada bulan Juni 1401, Tamerlane, anak cucu Khan Yang Agung, menyerang dan menduduki Bagdad dan membunuh lebih dari 20.000 penduduk. Dia memerintahkan setiap tentaranya harus membawa paling sedikit dua kepala ketika kembali dari perang untuk menunjukkan hasil perjuangannya.

Pada tahun 1534 setelah hampir satu abad menduduki Konstantinopel dan mengalahkan Kekaisaran Bizantium, Sultan Ottoman dari Turki menyerang dan menduduki Bagdad dan mengontrol seluruh wilayah Mesopotamia. Wilayah Mesopotamia ini telah menjadi medan peperangan dan perebutan kekuasaan silih berganti selama tiga ratus tahun antara Kesultanan Ottoman dan Kekaisaran Safavid dari Persia⁴¹. Pada abad ke-16 dan ke-17 wilayah teritorial yang dinamakan Irak saat itu secara gradual berhubungan dengan apa yang dinamakannya Tiga Propinsi, berdasarkan kepada kota Mosul, Bagdad dan Basrah. Kata Irak itu sendiri berasal dari kata Al-Iraq yang berarti tanah pinggir sepanjang sungai termasuk tanah pengembalaan di sekitar pinggir sungai itu. Terminologi Irak itu paling tidak telah digunakan oleh ahli geografi Arab sejak abad ke-8 dengan melihat kenyataan geografi Irak yang merupakan tanah datar yang luas di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris, yang oleh bangsa Eropa dikenal dengan nama Mesopotamia⁴². Pada saat itu Sultan-Sultan Ottoman berupaya melebarkan sayapnya ke daerah-daerah sekitarnya dalam upaya mengimbangi ambisi Shah Safavid dari Persia. Rivalitas antara Ottoman yang Suni dan Safavid yang Shiah sangat mewarnai perilaku para pemimpinnya dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di kedua negara itu.

Kekuasaan Sultan Ottoman pada saat itu meliputi tiga propinsi, yaitu Mosul, Bagdad dan Basrah. Kuwait menjadi bagian dari Propinsi Basrah dan

⁴¹ Barry M. Lando, *Web of Deceit, The History of Western Complicity in Iraq, From Chus chil to Kennedy to George W. Bush*, Other Press, New York, 2007, hal. 8

⁴² Tripp, *opcit*, hal. 8

merupakan wilayah paling Selatan dari kekuasaan Ottoman. Pemerintahan Ottoman di tiga propinsi itu berada ditangan Pimpinan Militer yang dinamakan Mamluk sebagai perpanjangan tangan Sultan Ottoman di wilayah itu. Namun lama kelamaan kekuasaan Mamluk ini di luar pengendalian Sultan Ottoman. Dalam upaya mengendalikan kekuatan militernya untuk menghadapi Persia dan negara tetangganya, Mamluk memerlukan aliansi dengan Suku-Suku Arab yang kuat untuk melindungi Bagdad dan Basrah. Mamluk melaksanakan pemerintahannya berdasarkan sistem upeti. Fungsi utama pemerintah adalah memelihara mereka agar memperoleh penghasilan yang baik agar dapat memberikan upeti kepada pemerintah yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan masyarakat dan mempertahankan diri dari setiap ancaman dari dalam maupun luar. Pada masa ini mulai diperkenalkan pajak bagi rakyat dan bea bagi barang-barang yang transit di Irak. Pada abad ke-18 perdagangan di wilayah ini bertambah pesat ketika perusahaan Inggris *the British East India Company* melakukan perdagangan melalui Irak. Namun pada tahun 1831 Kesultanan Ottoman dapat menjatuhkan regim Mamluk. Namun kekuasaan Ottoman inipun berakhir ketika terjadi Perang Dunia I, karena Kesultanan Ottoman berfihak kepada Jerman yang dapat dikalahkan oleh Sekutu Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.

Pada tahun 1917 Inggris melakukan invasi terhadap Irak dan berhasil mengalahkan tentara Ottoman dan menduduki Bagdad. Selanjutnya Inggris dan Perancis berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot bersama-sama membebaskan Irak dari penguasaan Kesultanan Ottoman. Pada 11 Nopember 1920 Irak menjadi Mandat Liga Bangsa Bangsa dibawah kontrol Inggris dengan nama "Negara Irak". Inggris menjatuhkan Monarki Hashemi di Irak dan menentukan batas-batas teritorial Irak tanpa memperhatikan kondisi politik dan perbedaan suku, agama dan ras, khususnya terhadap suku Kurdi dan Siria di Utara. Selama pendudukan Inggris suku Kurdi dan Shiah melakukan perlawanan untuk mencapai kemerdekaannya, namun tidak pernah berhasil. Selama Irak menjadi Mandat Inggris, Pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan kaum minoritas Sunni di Irak. Inggris mendukung kaum tradisional, pemimpin Sunni dan gerakan nasionalis di pedesaan. Pemerintah Inggris juga mengeluarkan berbagai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah, sengketa pertanahan dan urusan sewa menyewa

tanah di Irak. Dalam menyelesaikan setiap konflik di Irak, Inggris tidak segan-segan untuk mengerahkan kekuatan militernya untuk memperkuat kekuasaannya di Irak.

Pada tahun 1921 dilaksanakan plebisit di Irak dan berhasil memberikan legitimasi dan memproklamasikan Emir Faisal sebagai Raja Irak. Namun dalam kenyataannya kemerdekaan Irak baru dirasakan pada tahun 1932 ketika Mandat Inggris berakhir. Pada tahun 1927 ladang minyak yang sangat besar ditemukan di sekitar Kirkuk dan dari hasil minyak itulah Irak dapat meningkatkan pembangunan ekonominya. Pada tahun 1933 Raja Faisal I digantikan oleh putranya Raja Ghazi. Raja Ghazi menyatakan bahwa kekuasaan Irak hingga ke wilayah Selatan dan mencakup wilayah Kuwait. Pada tahun 1945 Irak menjadi anggota PBB dan menjadi pendiri Liga Arab. Pada saat didirikan Negara Israel pada tahun 1948, Irak dengan lima negara Arab lainnya berperang melawan Israel hingga terjadi gencatan senjata yang ditandatangani pada Mei 1949. Perang melawan Israel ini sangat berdampak negatif terhadap perekonomian Irak, karena pemerintah harus mengalokasikan 40% anggaran negaranya bagi Angkatan Perangnya dan membiayai pengungsi Palestina.

Pada tahun 1956 Irak bersama Turki, Iran, Pakistan dan Inggris menandatangani Pakta Bagdad dalam upaya melawan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang melaksanakan kampanye anti Monarki Irak. Pada tahun 1958 Raja Hussein dari Yordania dan Penguasa Irak Abdallah mengusulkan dibentuknya Persekutuan Monarki Hashemi untuk melawan Persekutuan Mesir-Siria yang baru saja dibentuk. Perdana Menteri Irak Nuri as-Said meminta Kuwait menjadi bagian dari Persekutuan Monarki Hashemi dan mengundang Penguasa Kuwait Sheik Abdallah al-Salim ke Bagdad untuk membicarakan nasib Kuwait di masa depan. Namun kebijakan Penguasa Irak ini mendapat tentangan keras dari Inggris yang tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Kuwait. Akibatnya terjadi konflik antara Inggris dengan Penguasa Irak. Situasi ini mengakibatkan Monarki Irak terisolasi dan menimbulkan gejolak di dalam negeri.

Pada 14 Juli 1958 para perwira dari Brigade ke-19 dibawah pimpinan Brigjen Abdul Karim Qasim dan Kolonel Abdul Salam Arif menggulingkan kekuasaan Monarki. Pemerintahan baru Irak menyatakan bahwa Irak menjadi sebuah Republik dan menolak bergabung dengan Yordania. Keterlibatan Irak dalam Pakta Bagdad dinyatakan dihentikan. Pemerintahan Qasim yang menjauhi

Mesir mengakibatkan adanya resistensi dari para perwiranya termasuk Kolonel Arif, namun Presiden Qasim berusaha meredam kekuatan yang menentang pemerintahannya dengan memenjarakan koleganya Kolonel Arif dan mengizinkan Pemimpin Kurdi di ada di pengasingan untuk kembali untuk meredam pemberontakan suku Kurdi yang pro Mesir.

Pada tahun 1961, Kuwait memperoleh kemerdekaannya dari Inggris dan Irak menolak dan menyatakan bahwa Kuwait adalah dibawah kekuasaan Irak. Akibatnya Inggris menolak keras pernyataan Irak tersebut dan mengirim pasukan militernya untuk melindungi Kuwait. Dengan tekanan keras Inggris, akhirnya pada tahun 1963 Irak mengakui kedaulatan Kuwait.

Dalam situasi negara yang tidak menentu, pada Februari 1963 Presiden Qasim dibunuh dan Partai Baath dibawah pimpinan Jenderal Ahmed Hasan al-Bakr (Perdana Menteri) dan Kolonel Abdul Salam Arif (Presiden) mengambil alih kekuasaan. Sembilan bulan kemudian Kolonel Abdul Salam Arif melakukan kudeta terhadap Pemerintahan Partai Baath. Namun pada April 1966 Presiden Abdul Salam Arif meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter dan digantikan oleh adiknya Jenderal Abdul Rahman Arif. Setelah berakhirnya Perang Enam Hari dengan Israel pada tahun 1967, Partai Baath merasa sudah kuat kembali dan mengambilalih kekuasaan pada 17 Juli 1968 dan Ahmad Hasan al-Bakr menjadi Presiden dan Ketua Dewan Komando Revolusi (*the Revolutionary Command Council*). Setelah revolusi 1968 ini, perekonomian Irak mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bila Presiden Arif memprioritaskan 90% anggaran negara untuk kepentingan militer, Partai Baath justru memberikan prioritas kepada pembangunan industri dan pertanian. Pada masa ini Irak melakukan nasionalisasi perusahaan minyaknya dan hal ini mengakibatkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi Irak.

Pada era tahun 1970an sengketa perbatasan dengan Kuwait masih sering terjadi. Kuwait menolak untuk memberikan ijin kepada Irak untuk membangun pelabuhan di Delta Shatt al-Arab. Penolakan ini memperkuat keyakinan Irak bahwa kekuatan konservatif di wilayah Teluk berupaya untuk mengontrol Teluk Persia. Pendudukan Iran atas beberapa pulau di Selat Hormuz menambah kekhawatiran Irak terhadap Iran. Sengketa perbatasan Irak dengan Iran tidak dapat dihindari, namun untuk sementara dapat diredam dengan ditandatanganinya Perjanjian Aljazair pada 6 Maret 1975.

Pada Juli 1979 Presiden Ahmad Hasan al-Bakr mengundurkan diri dan dia memilih Saddam Hussein sebagai penggantinya menjadi Presiden dan Ketua Dewan Komando Revolusi Irak. Dibawah kepemimpinan Saddam Hussein ini Irak menjadi negara yang kaya dan kuat yang didukung oleh perekonomian yang berkembang pesat dan Angkatan Perangnya yang besar. Dengan kekayaan dan kekuatannya itulah mendorong ambisi Saddam Hussein untuk menjadi Pemimpin dan orang yang paling berpengaruh di Dunia Arab. Perang Iran-Irak pada tahun 1980-1988 menunjukkan ambisi Presiden Saddam Hussein untuk menguasai wilayah di sekitarnya. Demikian juga sengketa perbatasan yang berkepanjangan antara Irak dengan Kuwait yang mengakibatkan invasi Irak terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 merupakan arogansi dan ambisi Saddam Hussein untuk menunjukkan kekuatan Irak kepada negara-negara Arab tetangganya.

2. Latar Belakang Ekonomi.

Perang delapan tahun antara Irak dan Iran pada tahun 1980-1988 memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi Irak. Perang telah mengubah Irak dari negara yang stabil dan kaya menjadi negara yang miskin. Pada tahun 1980 Irak memiliki cadangan devisa sebesar 30 Milyar US Dollar, namun pada tahun 1988 Irak justru menjadi negara yang memiliki hutang luar negeri yang sangat besar yaitu berkisar antara 100-120 Milyar US Dollar. Disamping itu Irak membutuhkan biaya yang sangat besar bagi rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur yang hancur akibat perang.⁴³ Sumber dana untuk pembiayaan negaranya hanyalah dari hasil penjualan minyak yang setiap tahunnya tidak lebih dari 10 Milyar US Dollar akibat dari harga minyak dunia yang rendah dan persediaan minyak dunia yang berlimpah.

Pada kondisi ekonomi yang sangat rentan itu, Presiden Saddam Hussein menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terbatasnya anggaran belanja negara dan untuk menjaga perekonomian yang berbasis subsidi, impor dan konsumsi menciptakan pandangan baru rakyat Irak terhadap pemimpinnya. Pandangan rakyat Irak tidak lagi atas dasar patriotik namun lebih kepada ketidakmampuan dalam mengelola perekonomian negara. Selanjutnya hutang luar negeri yang sangat besar telah

⁴³ Finlan, opcit, hal.14

menempatkan Irak sebagai negara penghutang dan hal ini sangat menurunkan kredibilitas Presiden Saddam Hussein sebagai pemimpin yang sangat kuat di mata rakyatnya sendiri. Proses liberalisasi ekonomi yang telah dimulai ketika perang dengan Iran berkecamuk terus berkembang dan bertambah kuat, paling tidak telah diperkuat dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Irak. Pengendalian harga oleh pemerintah dihilangkan, kewiraswastaan lebih didorong, badan-badan usaha milik negara dijual kepada swasta. Demikian juga asset-asset pemerintah yang kecil dijual kepada swasta dan pemerintah melepaskan sektor publik kepada swasta. Perijinan diberikan kepada proyek-proyek industri yang dimiliki oleh swasta, sektor swasta menguasai hampir seperempat impor komoditi yang dibutuhkan Irak dan mengundang investasi dari negara-negara tetangga Arab untuk menanamkan modalnya di Irak. Kegiatan ekonomi liberal itu memberikan kesempatan bagi orang-orang dekat kekuasaan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya⁴⁴. Akibatnya timbul kolusi, korupsi dan nepotisme yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Irak.

Adanya beban hutang luar negeri yang besar, kebutuhan dana yang sangat besar bagi rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat perang, rendahnya harga minyak, dana yang besar untuk impor kebutuhan pangan bagi tentara dan rakyatnya yang telah melampaui pendapatan dari penjualan minyak, kesemuanya itu memerlukan jalan keluar yang lebih drastis. Oleh karena itu Presiden Saddam Hussein melakukan perubahan kabinet dengan mengganti Tim Ekonominya pada tahun 1989 dan melakukan gerakan penghematan nasional. Penghematan yang dilakukan dengan mengurangi pegawai pemerintah dan tentara hanya menambah pengangguran di Irak⁴⁵. Itulah sebabnya Irak meminta kepada OPEC untuk menaikkan harga minyak dengan membatasi kuota bagi negara-negara pengekspor minyak. Khususnya kepada Arab Saudi dan Kuwait, Irak meminta agar kedua negara itu untuk bekerjasama memelihara harga minyak yang tinggi dengan mengurangi produksi minyaknya. Selanjutnya Irak juga meminta berulang kali agar pinjaman sebesar 40 Milyar US Dollar selama perang dengan Iran dinyatakan sebagai bantuan gratis bukan sebagai pinjaman. Irak juga meminta agar Arab Saudi dan Kuwait membantu dan

⁴⁴ Tripp, *opcit*, hal. 242

⁴⁵ *Ibid*, hal. 242

memberikan kontribusi besar terhadap rekonstruksi perekonomian Irak. Presiden Saddam Hussein menegaskan apabila mereka tidak memberikan bantuan dana kepada Irak, Irak mengetahui bagaimana untuk memperolehnya.⁴⁶ Namun baik Arab Saudi maupun Kuwait menolak permintaan Presiden Saddam Hussein. Penolakan itu mengakibatkan Presiden Saddam Hussein marah dan mengancam kedua negara itu dengan ancaman kekerasan. Apabila Arab Saudi dan Kuwait tidak memberikan bantuan yang diminta, maka Irak akan menggunakan segala cara untuk memaksa mereka (*Iraq might use other means to extract them*).⁴⁷ Kesulitan ekonomi itulah yang mendorong Irak untuk berupaya meminta bantuan dukungan kepada negara-negara Arab khususnya kepada Arab Saudi dan Kuwait. Ketika Arab Saudi dan Kuwait ternyata tidak mau membantu Irak dan justru melawan Irak, hal inilah salah satu faktor yang memicu keinginan Irak untuk menginvasi Kuwait.

3. Ambisi Saddam Hussein

Perubahan dramatis Saddam Hussein dari seorang penghuni penjara menjadi pemimpin revolusi Irak merupakan prestasi yang luar biasa bagi orang biasa. Berbekal kekerabatan dengan Jenderal Ahmed Hasan al-Bakr dan dukungan dari koleganya selama di pengasingan memberikan jalan bagi Saddam Hussein menuju puncak kariernya. Hal itu seperti sebuah wasiat yang sangat menguntungkan bagi ambisi Saddam Hussein untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Keberuntungan itu dikelola dengan baik oleh Saddam Hussein untuk mencapai pimpinan puncak revolusi di Irak sejak ia masih muda. Tidak ada seorangpun yang muncul dalam kelompok pemimpin kudeta tahun 1968 adalah seorang yang tidak memiliki ayah dan petani miskin tanpa pelatihan formal, kecuali Saddam Hussein. Sejak kepindahannya ke Bagdad bersama pamannya Khairallah, Saddam Hussein hanya memiliki kemampuan sebagai aktivis politik yang memiliki sifat premanisme. Ideologi Saddam Hussein sangat diwarnai oleh kebencian terhadap orang asing, jiwa patriotiknya yang sangat tinggi dan pandangannya terhadap politik yang menganggap bahwa kesuksesan di bidang

⁴⁶ Con Coughlin, *Saddam – His Rise and Fall*, Ecco-Harper Perennial, New York, 2002, hal.247

⁴⁷ Tripp, *opcit*, hal. 242

politik ditentukan oleh akuisisi, kekerabatan dan hak untuk memiliki kekuasaan mutlak yang dicapai dengan segala cara.⁴⁸

Sebelum dipenjara pada tahun 1964, Saddam Husein telah memperoleh jabatan sebagai Pimpinan Wilayah dari Partai Baath sebagai penghargaan atas semangat dan kerjakerasnya dalam menghancurkan komunis di Irak. Keruntuhan Partai Baath pada akhir tahun 1963 dan awal 1964 akibat dari konflik internal partai telah membuat Saddam Hussein memegang kendali Partai Baath selama dan setelah di penjara. Setelah keluar dari penjara Saddam Hussein menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Regional Partai Baath pada bulan September 1966. Kongres memutuskan untuk meninggalkan Komando Tunggal Partai Baath yang bermarkas di Damaskus Siria dan membangun Komando Regional Partai Baath di negara masing-masing. Oleh karena itulah Komando Nasional Partai Baath di Siria memecat Ahmed Hasan al-Bakr dan Saddam Hussein dari kepemimpinan Komando Regional Irak. Namun kedua pemimpin Irak itu justru membentuk Komando Irak.⁴⁹ Keputusan ini mengakibatkan perselisihan antara Partai Baath Siria dan Irak, karena mereka sama-sama mengakui bahwa merekalah yang merupakan Partai Baath yang asli dan menyatakan merekalah yang menjadi Pemimpin kaum Baath di seluruh tanah Arab. Pada tahun 1968 Partai Baath Irak membentuk Komando Nasional sendiri dan mengangkat Ahmed Hasan al-Bakr sebagai Sekretaris Jenderal dan Saddam Hussein sebagai Wakilnya.⁵⁰

Selama periode itu Saddam Hussein membangun kekuatan sehingga ia menjadi orang kuat dalam Pemerintahan Partai Baath. Perilaku Saddam Hussein yang kasar dan tidak banyak bicara sama sekali tidak berubah⁵¹. Perilaku tersebut terlihat jelas ketika Saddam Hussein mengikuti kuliah hukum di Universitas Bagdad. Pada saat kuliah Saddam Husein selalu membawa pistol dan dikawal oleh para pengikutnya yang disebut *Saddameen* (pengikut Saddam). Tidak ada seorangpun yang berani melawan Saddam Husein di kampus, walaupun perilaku dan perbuatannya bertentangan dengan mereka. Saddam Hussein tidak ragu-ragu menggunakan Saddameennya untuk

⁴⁸ Coughlin, opcit, hal.61

⁴⁹ Said K.Aburish, *Saddam Hussein – The Politics of Revenge*, Bloomsbury, New York-London, 2000, hal. 66

⁵⁰ Coughlin, opcit, hal. 62

⁵¹ Ibid, hal. 62

melakukan intimidasi dan ancaman terhadap mereka yang tidak sepaham dengan pandangannya dan bahkan para pengikutnya tidak segan-segan untuk menembakan senapan mesin terhadap rumah orang yang tidak sepaham dengan Saddam Hussein.

Di tengah-tengah kondisi politik yang kacau, Saddam Hussein bekerja keras melaksanakan konsolidasi untuk memperkuat posisinya di Partai Baath. Setelah memperoleh posisi yang baik, Saddam Hussein mencoba untuk memasuki kepemimpinan Partai Baath Internasional pada Pertemuan Puncak Pemimpin Partai Baath dalam Kongres Partai Baath Pan-Arab ke-9 di Beirut pada bulan Desember 1967. Promosi yang dilakukan delegasi Partai Baath Irak agar Saddam Hussein menjadi salah satu pimpinan dalam Badan Partai Baath Internasional ditolak oleh forum karena reputasi Saddam Hussein yang dinilai kurang baik. Bahkan nama Saddam Hussein dicoret dari daftar calon yang diajukan dalam Kongres tersebut. Penolakan itu sangat memukul kehormatan Saddam Hussein dan hal itu tidak pernah dilupakan sepanjang hidupnya.⁵²

Pada tahun tahun 1970 Pemerintah Irak mengeluarkan konstitusi baru yang menyatakan bahwa Dewan Komando Revolusi menjadi Lembaga Negara Tertinggi Irak dan mengangkat Ahmed Hasan al-Bakr sebagai Presiden dan Saddam Hussein sebagai Wakil Presiden. Dewan Komando Revolusi memiliki kekuasaan mengeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, memobilisasi kekuatan militer, menyetujui anggaran negara, memperbaiki perjanjian-perjanjian, mendeklarasikan perang dan menciptakan perdamaian. Dewan juga mempunyai kekuasaan terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan negara. Konstitusi menetapkan bahwa Dewan Komando Revolusi dapat memilih, mengangkat dan memberhentikan anggotanya sendiri serta anggota Dewan yang baru harus diseleksi dari Dewan Komando Regional. Namun aturan ini tidak berlaku bagi Saddam Hussein, dia diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Komando Revolusi bukan hasil seleksi dari Regional, namun diangkat berdasarkan kroni dan kekerabatan dengan Presiden Ahmed Hasan al-Bakr yang mengangkat Saddam Hussein pada jabatan penting dalam Partai Baath. Dengan jabatan itulah Saddam Hussein memperkuat posisinya agar dapat menguasai Partai Baath dan menjadi Presiden Irak di kemudian hari.⁵³

⁵² Ibid, hal. 69

⁵³ Aburish, opcit, hal.91

Pada bulan Juli 1979 Presiden Irak Ahmed Hasan al-Bakr mengumumkan pengunduran dirinya dan mengangkat Saddam Hussein sebagai Presiden Irak dan sekaligus menjadi Ketua Dewan Komando Revolusi. Kesabaran, kerja keras, ambisi, hukuman penjara dan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Saddam Hussein terbayar lunas ketika ia menjadi Presiden Irak. Tidak seperti pendahulunya, Saddam Hussein tidak menghendaki pembagian kekuasaan. Saddam Hussein lebih suka semua kekuasaan negara berada ditangannya sebagai seorang diktator. Saddam Hussein memegang semua jabatan tinggi negara, selain sebagai Presiden, dia juga sebagai Ketua Dewan Komando Revolusi, Sekretaris Jenderal Partai Baath, Perdana Menteri dan Panglima Angkatan Perang Irak. Dengan mencontoh Presiden Uni Soviet Joseph Stalin, Saddam Hussein telah menjadi Pemimpin Tertinggi Irak⁵⁴.

Sejak tahun 1978 Saddam Hussein melakukan manuver untuk menempatkan Irak sebagai negara yang sangat penting di dunia Arab. Pertemuan puncak negara-negara Arab sejak tahun 1978, 1979 dan pada bulan Februari 1980 telah menelurkan Piagam Arab di Bagdad. Piagam Arab berisikan tujuan dan kepentingan bangsa Arab. Namun dalam kenyataannya inti pokok Piagam Arab tidak lebih penting dari penampilan Saddam Hussein yang mensponsori pertemuan puncak itu. Saddam Hussein ingin menunjukkan kepada pemimpin negara-negara Arab bahwa Irak pantas menjadi pemimpin dunia Arab karena Irak telah menjadi negara yang kaya, memiliki militer yang kuat dan politik yang stabil. Penegasan menjadi pemimpin Dunia Arab merupakan hal yang sangat penting bagi Saddam Hussein untuk membangun citranya sebagai pemimpin bersejarah Bangsa Arab dan juga untuk memelihara kesetiaan kaum Arab Sunni di Irak yang berada dalam pusat kekuasaannya. Saddam Hussein memandang Dunia Arab sebagai panggung yang diciptakan untuk dirinya agar dapat memerankan sebagai pemimpin Dunia Arab bagi kepentingan dirinya sendiri dan mempertahankan kekuasaannya di Irak⁵⁵. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Saddam Hussein sangat berambisi untuk menjadi Pemimpin Dunia Arab.

Invasi Irak terhadap Kuwait itu merupakan akumulasi kemarahan, kekerasan dan ambisi Saddam Hussein untuk menguasai Kuwait. Ancaman Irak terhadap Kuwait sudah sering terjadi dalam sejarah kedua negara tersebut. Pada

⁵⁴ Coughlin, opcit, hal.151

⁵⁵ Tripp, opcit, hal. 222

tahun 1937, Raja Irak Ghazi sangat marah ketika Inggris menduduki Kuwait. Demikian juga ketika Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961, Presiden Irak Qassem melakukan penolakan dan menyatakan bahwa Kuwait adalah bagian integral dari Irak dan menjadi salah satu propinsi Irak dan mengangkat gubernur bagi propinsi barunya itu. Pada tahun 1970 konflik antara Irak dan Kuwait terjadi dalam memperebutkan dua pulau, yaitu Warbah dan Bubiyan yang berada di Teluk Persia, yang berakhir dengan pendudukan kedua pulau itu oleh tentara Irak. Intimidasi Irak terhadap Kuwait terjadi ketika perayaan hari ulang tahun Partai Baath pada Juli 1990. Pada saat itu Saddam Hussein menyampaikan beberapa permintaan kepada Kuwait termasuk stabilisasi harga minyak internasional, menghapus hutang Irak yang diberikan selama perang dengan Iran, agar dibentuk Arab Plan yang berisi program bantuan untuk rekonstruksi Irak. Apabila Kuwait tidak mau menerima permintaan Irak, maka Saddam Hussein mengancam Kuwait dengan ancaman kekerasan⁵⁶. Disamping itu Saddam Hussein ingin membuktikan bahwa Irak dengan kekuatan militernya yang besar pantas menjadi Pemimpin Dunia Arab. Ambisi Saddam Hussein inilah yang merupakan juga faktor pendorong dilancarkannya invasi Irak terhadap Kuwait.

B. Kepentingan Nasional Irak

1. Memelihara Integritas Bangsa dan Negara.

Setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran telah membuat Irak menghadapi berbagai masalah. Masalah yang paling utama yang dihadapi Saddam Hussein adalah menjaga kekuasaan dan memelihara integritas bangsa dan negara. Saddam Hussein masih menghadapi pemberontakan Kurdi di Wilayah Utara dan persoalan Kaum Shiah di Wilayah Selatan. Untuk itulah pada tahun 1989 Saddam Hussein mulai mengendurkan kekuasaannya dengan mengadakan pemilihan untuk Majelis Nasional (*National Assembly*), memberikan kesempatan bagi partai oposisi dan memberikan amnesti umum. Dengan kebijakan baru itu diharapkan terjadinya persatuan dan kesatuan nasional bagi

⁵⁶ Coughlin, opcit, hal. 248

rakyat Irak. Integritas negara dan bangsa merupakan kepentingan nasional Irak yang senantiasa harus dijaga dan dipelihara. Gangguan dan ancaman terhadap integritas negara dan bangsa Irak selalu terjadi, karena Suku Kurdi yang menginginkan kemerdekaannya mendapat dukungan dari Iran dan Israel. Demikian juga kaum Shiah Irak dalam setiap gerakannya selalu didukung oleh Iran sebagai negara Islam Shiah. Untuk itulah Irak berupaya untuk mempersatukan bangsa dan negaranya agar tidak dapat diintervensi oleh negara lain.

Kondisi ekonomi yang hancur akibat perang sangat mempengaruhi wibawa Saddam Hussein. Rakyat yang sebelumnya dipersatukan dengan adanya perang melawan Iran, setelah perang selesai rakyat seolah-olah kehilangan rasa persatuan. Yang dirasakan oleh rakyat Irak hanyalah kesulitan ekonomi yang melanda seluruh negeri. Untuk menghadapi masalah dalam negeri seperti itulah Irak mencari strategi untuk mempersatukan rakyatnya. Satu-satunya cara yang paling ampuh adalah mencari musuh bersama untuk dilawan bersama sebagai sebuah bangsa. Hal itulah yang ditempuh oleh Saddam Hussein dengan mengancam Kuwait apabila Kuwait tidak mau membantu Irak. Ketika Kuwait makin tidak peduli terhadap permintaan Irak. Hal itulah yang disampaikan kepada rakyatnya bahwa Irak telah berkorban untuk melindungi Kuwait dalam perang dengan Iran, namun Kuwait tidak mengucapkan terima kasih justru menolak membantu Irak dengan kesombongannya. Dengan propaganda itulah Saddam Hussein memperoleh dukungan rakyatnya untuk melakukan konfrontasi dengan Kuwait. Oleh karena itulah tanpa banyak bicara Saddam Hussein memerintahkan pasukannya menyerbu Kuwait dan itu merupakan salah satu cara yang digunakan Saddam Hussein untuk mempertahankan kekuasaan dan persatuan bangsanya.

2. Memulihkan Perekonomian Nasional

Sebelum perang dengan Iran pada tahun 1980-1988, Irak merupakan negara yang kuat dan kaya. Namun setelah perang usai, Irak menjadi negara yang miskin dengan hutang luar negerinya yang sangat besar. Kepentingan nasional Irak pasca perang dengan Iran adalah memulihkan kondisi perekonomiannya. Disamping perekonomiannya yang hancur, Irak juga

menghadapi pengangguran yang sangat besar. Tidak kurang dari 500.000 tentara Irak yang harus dibebastugaskan akan menjadi pengangguran yang tidak dapat terserap oleh pasar tenaga kerja Irak. Infrastruktur di seluruh wilayah Irak mengalami kehancuran walaupun tidak sebesar yang dialami oleh Iran. Ladang minyak di Kirkuk mengalami kerusakan besar. Demikian juga pelabuhan dan kilang minyak di Basrah mengalami nasib yang sama dan hancur total. Menurut para ahli untuk memulihkan perekonomian dan infrastruktur, Irak membutuhkan dana lebih kurang 452.6 Milyar US Dollar.⁵⁷

Dalam menghadapi kesulitan ekonomi, Irak juga menghadapi harga minyak yang sangat rendah. Harga minyak dunia pada saat itu jatuh dari 20 US Dollar per barel menjadi 13.70 US Dollar per barel. Hal ini mengakibatkan Irak kehilangan pendapatannya hampir 10 Milyar US Dollar⁵⁸. Sementara kebutuhan untuk menghidupi rakyatnya dan membiayai Angkatan Bersenjata membutuhkan dana yang sangat besar. Itulah sebabnya Irak meminta kepada Arab Saudi dan Kuwait untuk memberikan bantuan ekonomi dengan cara mengapus hutang luar negerinya, mengurangi kuota produksi minyak agar harga minyak menjadi lebih tinggi dan memberikan bantuan dana langsung untuk mendukung kebutuhan mendesak Irak. Kepentingan nasional Irak di bidang ekonomi inilah yang terus diperjuangkan Irak agar Irak dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya yang pernah diberikan sebelum perang dengan Iran.

Salah satu upaya untuk memulihkan perekonomiannya, Saddam Hussein meminta bantuan kepada negara-negara Arab khususnya kepada Arab Saudi dan Kuwait. Permintaan Saddam Hussein tidak ditanggapi oleh kedua negara tersebut. Bahkan Kuwait sebagai negara tetangga terdekat justru melawan Irak dengan pernyataan-pernyataan Penguasa Kuwait yang sangat menyakitkan hati Saddam Hussein. Untuk meningkatkan perekonomiannya dan memperkuat Angkatan Lautnya, Irak membutuhkan akses yang cukup luas ke laut lepas. Panjang pantai yang dikuasai Irak di wilayah Basrah sangat tidak memungkinkan Irak mempunyai akses yang baik ke laut. Itulah sebabnya Irak meminta kepada Kuwait untuk memberikan akses ke laut kepada Irak. Namun

⁵⁷ Thabit A.J.Abdullah, *A Short History of Iraq*, Pearson Education Ltd, Essex, 2003, hal.190

⁵⁸ Ibid, hal.192

Kuwait tidak mau memberikan. Hal-hal itulah yang juga menjadi faktor pemicu dan pendorong invasi Irak terhadap Kuwait.

3. Meningkatkan Sumberdaya Minyak.

Pada tahun 1989 Irak diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 100 Milyar barel, sebuah asset yang sangat berharga bagi perekonomian Irak.⁵⁹ Namun dengan cadangan seperti itu Irak merasa ada cadangan minyaknya yang masih dapat dikuasai, yaitu cadangan minyak di Rumailah yang dikuasai oleh Kuwait dan di wilayah Ratga yang oleh Irak dinyatakan telah dicuri oleh Kuwait melalui pengeboran miringnya. Irak berpandangan bahwa minyak dapat digunakan sebagai modal untuk memperkuat negara dan mensejahterakan rakyatnya. Disamping itu minyak juga dapat digunakan sebagai senjata untuk memaksa negara-negara besar dan konsumen minyak untuk memenuhi tuntutan Irak. Hal itulah yang mendorong Irak untuk meningkatkan cadangan minyaknya dengan mencari dan menguasai ladang-ladang minyak yang belum dimilikinya.

Bagi Irak, kepemilikan dan penguasaan minyak merupakan masalah mati dan hidupnya negara Irak, karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari minyak. Hasil pendapatan dari minyak itulah yang digunakan untuk mengelola negara dan memberikan kehidupan dan penghidupan bagi rakyat Irak. Oleh karena itu penguasaan ladang dan cadangan minyak merupakan kepentingan nasional Irak yang utama, karena hal itu menyangkut masa depan bangsa dan negara Irak. Keinginan Irak untuk menguasai ladang minyak di wilayah Rumailah dan Ratga merupakan perwujudan perjuangan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi dalam negerinya, Irak meminta kepada Kuwait agar memberikan ganti rugi atas minyak yang diambil dari ladang minyak Ratga selama beberapa tahun. Demikian juga Irak menuntut bahwa ladang minyak Rumailah adalah termasuk dalam wilayah Irak. Semua permintaan Irak tidak ditanggapi oleh Kuwait. Hal itulah yang juga salah satu pemicu kemarahan Irak terhadap Kuwait yang mengakibatkan terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait.

⁵⁹ Ibid, hal. 191

C. Invasi Militer Irak dan Situasi Pasca Invasi.

1. Situasi menjelang Invasi.

Pada bulan Januari 1990 Irak mengumumkan bahwa Irak membutuhkan dana sebesar 9 Milyar US Dollar untuk membiayai rekonstruksi dan 4-5 Milyar US Dollar untuk membayar hutangnya yang digunakan untuk perang dengan Iran. Harga minyak dunia pada saat itu mencapai titik terendah hingga 13,7 US Dollar per barrel. Hal itu diakibatkan oleh pasokan minyak yang jauh melampaui kuota yang dilakukan oleh Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Situasi itu merupakan malapetaka besar bagi Irak, karena delapan tahun perang dengan Iran telah mengakibatkan kehancuran perekonomian Irak. Untuk itu Irak membutuhkan dana yang sangat besar untuk melakukan rekonstruksi dan pembangunan kembali ekonomi dan infrastrukturnya yang hancur. Ketika perang dengan Iran selesai, Irak hanya memiliki cadangan devisa 13 Milyar US Dollar, padahal kebutuhan untuk belanja negara sebesar 24 Milyar US Dollar dan hutang luar negerinya mencapai 100-120 Milyar US Dollar. Para ahli ekonomi Barat memperkirakan bahwa apabila seluruh hasil minyak Irak digunakan untuk biaya rekonstruksi, maka hal itu membutuhkan waktu selama 20 tahun untuk menyelesaikannya.⁶⁰

Ketika Konferensi Liga Arab diselenggarakan di Bagdad pada tahun 1989, Saddam Hussein menggunakan kesempatan itu untuk menggalang kekuatan melawan yang menurutnya konspirasi internasional yaitu antara Amerika Serikat, Inggris, Israel dan negara-negara Teluk yang akan menghancurkan ekonomi Irak. Raja Hussein dari Yordania yang merasa kebutuhan minyaknya dari Irak dan ancaman serangan Israel terhadap Irak harus melalui Yordania mengkritik Barat dan mendukung penuh upaya Saddam Hussein. Demikian juga Pemimpin PLO Yasser Arafat mendukung penuh Saddam Hussein. Pada saat konferensi dibuka, Presiden Saddam Hussein bertindak sangat hati-hati dan tidak menyebutkan apa-apa tentang Barat maupun Kuwait yang telah melampaui kuota produksi minyaknya dan juga menolak untuk meminta bantuan darimanapun. Namun Saddam Hussein mengatakan “Perang

⁶⁰ John Simpson, *The Wars Against Saddam, Taking the Hard Road to Baghdad*, Macmillan, Oxford, 2003, hal. 116

dapat dimulai dengan kekuatan militer dan kerusakan terbesar dilakukan dengan menggunakan bom, pembunuhan atau dengan cara kudeta. Namun pada suatu saat perang dapat dilancarkan melalui cara-cara ekonomi. Negara-negara yang menggunakan cara-cara ekonomi menentang Irak, saya harus mengatakan bahwa hal itu juga merupakan perang melawan Irak”⁶¹

Saddam Hussein sangat sensitif terhadap hal yang menyangkut loyalitas dan merasa telah dikhianati oleh Kuwait. Saddam Hussein merasa bahwa perang selama delapan tahun dengan Iran merupakan perang melawan kaum Shiah dan untuk melindungi negara-negara yang mayoritas penduduknya kaum Sunni seperti Arab Saudi dan Kuwait. Irak melindungi Kuwait dari ancaman dan subversi kaum Shiah Iran. Namun yang diperoleh Irak atas perjuangannya itu bukan ucapan terima kasih, tapi justru Kuwait bersekutu dengan Arab Saudi, Amerika dan Inggris untuk menghancurkan perekonomian Irak. Konflik antara Irak dan Kuwait berlanjut, ketika Irak meminta bantuan ekonomi kepada Kuwait, namun tidak ada jawaban dari Emir Kuwait. Hal itu membuat Saddam Hussein sangat marah terhadap Kuwait. Selanjutnya Saddam Hussein secara spesifik meminta kompensasi dari hasil minyak di Ratga yang merupakan wilayah Rumailah di perbatasan Irak-Kuwait. Saddam Hussein berpandangan bahwa Kuwait telah mencuri minyaknya dari Ratga yang sepanjang sejarah menjadi milik Irak.⁶² Hal inipun ditolak oleh Kuwait dan bahkan Emir Kuwait menegaskan tidak akan memberikan apapun kepada Irak.⁶³

Masalah Ratga inilah yang diangkat oleh Saddam Hussein untuk menjadi isu konflik terhadap Kuwait. Hari-hari selanjutnya Saddam Hussein berupaya mencari cara atau strategi untuk dapat menekan Kuwait. Apabila Kuwait tidak mau memberikan bantuan keuangan terhadap Irak, maka Irak akan menuntut wilayah sebagai pengganti uang. Ancaman Irak ini tidak mengubah pendirian Kuwait. Pada hari ulang tahun Partai Baath tanggal 17 Juli 1990, Saddam Hussein mengatakan bahwa Irak tidak akan mengangkat masalah konspirasi Kuwait di satu pihak dan imperialisme dan Yahudi di lain pihak, kita lebih baik mati daripada kehilangan kehidupan. Saddam Hussein juga mengancam ”apabila kata-kata tidak cukup untuk melindungi kita, maka tidak ada pilihan lain

⁶¹ Ibid, hal. 118

⁶² Ibid, hal. 118

⁶³ Coughlin, opcit, hal 248

bagi kita kecuali mengambil tindakan efektif untuk mengembalikan yang benar dan menjamin hak kita dikembalikan”⁶⁴. Hal inilah pertama kali Saddam Hussein menyebutkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan konflik dengan Kuwait. Dengan ancaman itu diharapkan Emir Kuwait dapat memberikan dan setuju untuk membantu Irak dalam mengatasi masalah ekonominya. Apabila hal itu tidak berhasil diharapkan negara-negara Arab penghasil minyak dapat menentukan harga minyaknya yang sesuai dengan keinginan Irak.

Kuwait yang didukung oleh Arab Saudi melakukan pengujian atas ancaman Irak dengan tidak melakukan negosiasi dengan Irak. Karena mereka berpandangan, saat itu bukan waktu yang baik untuk melakukan negosiasi dan justru merupakan saat Kuwait pada posisi yang lemah dan dapat didikte oleh Irak. Dengan kesombongannya yang sudah terkenal, Emir Kuwait menulis surat kepada Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk menolak permintaan Irak dan menyatakan bahwa ”Rakyat Kuwait, pada saat yang baik maupun buruk, adalah manusia yang memiliki prinsip dan integritas. Mereka tidak akan menyerah terhadap ancaman maupun pemerasan dalam segala situasi”.⁶⁵ Dalam menanggapi surat Emir Kuwait itu, Saddam Hussein mempunyai dua pilihan yaitu menerima kenyataan bahwa Kuwait tidak mau membantu atau terus melakukan tekanan terhadap Kuwait hingga mau menerima permintaan Irak. Namun Saddam Hussein bukanlah tipikal manusia yang mau menyerah begitu saja, dia seorang penjudi politik yang senantiasa melawan tantangan yang dihadapinya. Hal itu secara psikologis telah mendorong Saddam Hussein untuk terus melanjutkan tekanannya terhadap Kuwait. Oleh karena itulah pada 23 Juli 1990 Saddam Hussein mengerahkan kekuatan militernya ke perbatasan dengan Kuwait untuk menunjukkan kepada Kuwait dan Arab Saudi bahwa Irak sangat serius dalam memperjuangkan permintaannya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Amerika Serikat dan Inggris mendorong Kuwait untuk menolak keinginan Irak.⁶⁶

Amerika maupun Inggris tidak menganggap serius atas gerakan militer Irak ke perbatasan. Mereka menganggap bahwa Irak hanya ingin mempengaruhi jalannya Pertemuan OPEC di Jenewa pada 27 Juli 1990 agar OPEC dapat

⁶⁴ Simpson, *opcit*, hal. 121

⁶⁵ *Ibid*, hal.121

⁶⁶ Lando, *opcit*, hal. 121

menaikkan harga minyak sesuai kehendak Irak. Pada pertemuan itu OPEC menetapkan harga minyak sebesar 21 US Dollar yang semula 18 US Dollar dengan kuota sebesar 22.5 juta barel per hari⁶⁷. Dengan hasil itu konflik Irak dengan Kuwait diperkirakan akan berakhir, karena Irak telah memperoleh harga minyak yang diharapkannya. Ternyata Irak tidak puas dengan hasil pertemuan OPEC tersebut dan hal ini ditunjukkan dengan penambahan 20.000 tentaranya ke perbatasan Kuwait. Ketika bertemu dengan Dubes Amerika Serikat April Glaspie pada tanggal 25 Juli 1990, Saddam Hussein mengatakan bahwa Amerika Serikat membuat persekongkolan untuk menjatuhkan pemerintahannya dan tidak mau membantu perekonomian Irak. Untuk menghindari kebuntuan antara Irak dan Kuwait, beberapa mediator mencoba untuk membantu, diantaranya adalah Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto dan Pemimpin PLO Yasser Arafat. Dalam upaya menyelesaikan perselisihan antara Irak dan Kuwait, Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher justru meminta agar Kuwait tidak memberikan kompensasi apapun terhadap permintaan Irak. Hal itu membuat situasi antar kedua negara semakin panas.

Pada tanggal 28 Juli 1990 direncanakan adanya pertemuan antara Wapres Irak Izzat Ibrahim dengan delegasi dari Kuwait di Jeddah. Dalam pertemuan ini Irak akan mengajukan proposal yang meliputi serah terima sebagian ladang minyak Rumailah, pembayaran segera 2,4 Milyar US Dollar, penghapusan semua hutang Irak kepada Kuwait, tambahan kompensasi yaitu janji formal Kuwait untuk tidak melampaui kuota OPEC di masa mendatang. Karena proposal itu terlalu berat untuk Kuwait dan tidak ada kesepakatan, maka pertemuan ditunda. Akhirnya pada tanggal 31 Juli 1990 pertemuan dilaksanakan di Jeddah, namun semuanya berubah dan tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Saddam Hussein. Delegasi Irak terdiri dari Wapres Irak Izzat Ibrahim, Deputi Perdana Menteri Sa'doun Hammadi dan keponakan Saddam Hussein Ali Hassan al-Majid. Dari pihak Kuwait didominasi oleh keluarga Emir Kuwait dibawah pimpinan Putra Mahkota Kuwait. Sejak awal pertemuan Putra Mahkota Kuwait yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris tidak akan menyerah atas ancaman Irak. Sementara Irak kembali menegaskan permintaannya. Kedua belah pihak saling bersitegang dan tidak ada solusi yang diperoleh pada hari pertama. Pertemuan dilanjutkan pada hari berikutnya 1

⁶⁷ Simpson, opcit, hal. 122

Agustus 1990. Pada pertemuan itu situasi bertambah tegang dan panas ketika Delegasi Irak al-Majid berteriak bahwa Irak telah mempertahankan Kuwait dari ancaman Iran dan kini Irak meminta kompensasi. Putra Mahkota Kuwait menjawab dengan keras juga "Mengapa kamu tidak minum air laut saja"⁶⁸. Mendengar jawaban itu hampir terjadi perkelahian fisik, namun dapat dicegah oleh aparat keamanan Arab Saudi yang siap dalam ruang pertemuan. Pada akhir pertemuan terjadi penghinaan yang tidak dapat dimaafkan ketika al-Majid mengatakan bahwa Rakyat Irak saat ini dalam keadaan miskin diakibatkan oleh perang dan hampir tidak mempunyai uang untuk makan mereka. Namun Putra Mahkota Kuwait mengatakan kepada delegasinya "Mengapa mereka tidak mengirim istri-istrinya saja ke jalan untuk mencari uang untuk mereka?"⁶⁹ Selanjutnya Putra Mahkota Kuwait mengingatkan Irak agar jangan menakut-nakuti Kuwait, karena Kuwait mempunyai sahabat yang sangat kuat (*powerful*) dan Irak akan dipaksa untuk membayar hutangnya kepada Kuwait.⁷⁰ Kata-kata itulah yang membuat delegasi Irak marah besar dan meninggalkan pertemuan dengan hati yang panas dan sangat marah.

Saddam Hussein sangat marah mendengar laporan dari delegasi Irak dan atas penghinaan Putra Mahkota Kuwait. Pada petang hari tanggal 1 Agustus 1990 Saddam Hussein melakukan pertemuan tertutup dan hanya dihadiri oleh tiga orang kerabatnya, yaitu Ali Hasan al-Majid, Menteri Industri Pertahanan Hussein Kamel al-Majid, Kepala Polisi Rahasia dan merangkap Komandan Garda Revolusi Sabaawi Ibrahim. Dalam pertemuan itu Saddam Hussein memerintahkan pasukan militernya segera menyerang Kuwait, tidak boleh berhenti di ladang minyak Rumailah atau Jembatan Mutla, tapi terus memasuki dan menduduki seluruh wilayah Kuwait. Pada tanggal 2 Agustus 1990, ketika Pasukan Militer Irak memasuki dan menyerbu Kuwait, Saddam Hussein mengatakan kepada kerabatnya "Emir Kuwait tidak akan tidur di istananya malam ini".⁷¹ Invasi Irak terhadap Kuwait ini merupakan titik puncak kemarahan Saddam Hussein terhadap Pimpinan Kuwait atas arogansi dan penolakan permintaan bantuan ekonomi Irak.

⁶⁸ Ibid, hal. 128

⁶⁹ Simpson, opcit, hal. 128

⁷⁰ Hiro, opcit, hal. 34

⁷¹ Ibid, hal. 129

2. Invasi Irak dan Situasi Pasca Invasi.

Diatas kertas Irak memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan telah berpengalaman dalam delapan tahun perang melawan Iran. Angkatan Perang Irak merupakan angkatan perang nomor empat yang terbesar di dunia yang memiliki hampir satu juta prajurit dan menjadi dua kali lipat bila ditambah pasukan wajib militernya. Angkatan Perang Irak diperkuat oleh 6.000 Tank, 200 Helikopter serbu termasuk Helikopter Mi-24 yang secara efektif digunakan dalam melawan gerilya Kurdi di Irak Utara. Pertahanan Udara Irak dilengkapi dengan 10.000 Artileri Pertahanan Udara, 16.000 Rudal Permukaan ke Udara (*Surface to Air Missile*) seperti SA-2 dan SA-16 buatan Uni Soviet dan Rudal Roland buatan Perancis-Jerman. Kekuatan Angkatan Udara Irak juga mempunyai reputasi yang baik dengan kemampuan perang udara yang cukup kuat. Angkatan Udara Irak memiliki 900 pesawat tempur dari berbagai jenis seperti MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-29 Fulcrum dan Su-7, Su-20, Su-22, Su-24 dan Su-25 Frogfoot yang sangat handal. Irak juga memiliki pesawat pembom Tupolev Tu-16 dan Tu-22 termasuk juga pesawat pembom tempur Mirage F-1 buatan Perancis. Dalam menghadapi perang darat maupun laut, Angkatan Perang Irak dilengkapi dengan bom dan rudal canggih seperti Bom Kendali Laser AS-30L dan Rudal Anti Kapal Atas Air Exocet AM-39. Dalam mendukung operasi Angkatan Perangnya Irak telah membangun 50 Lapangan Terbang yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas jaringan Komando, Kendali dan Komunikasi yang canggih.

Irak memiliki Angkatan Laut yang relatif kecil dan terdiri dari 165 kapal dari berbagai jenis dan hampir semuanya tidak beroperasi. Namun Angkatan Laut Irak mempunyai enam Kapal Perang jenis OSA yang dilengkapi dengan Rudal Anti Kapal Atas Air Styk yang memiliki jangkauan 16-75 mil. Irak juga memiliki 50 Rudal Darat Silkworm buatan China yang jarak jangkauannya hingga 72 mil dan 800 Rudal Permukaan ke Permukaan Scud-B yang sangat berbahaya. Dengan kekuatan Angkatan Perang seperti itu, Irak merupakan negara yang memiliki mesin perang yang cukup disegani di wilayah Timur Tengah.⁷²

⁷² Finlan, *opcit*, hal. 20

Pada jam 01.00 dinihari waktu Irak tanggal 2 Agustus 1990 lebih dari 100.000 tentara Irak yang diperkuat dengan hampir 2.000 Tank menyerbu Kuwait. Perencanaan dan pengendalian invasi militer yang sangat baik dan efektif. Pasukan Garda Republik bersama-sama Divisi Pasukan Khusus menyerbu dan berhasil menduduki Kota Kuwait tanpa ada perlawanan yang berarti. Helikopter serbu mendaratkan pasukan Irak diseluruh wilayah Kuwait. Dalam waktu 24 jam seluruh wilayah Kuwait dapat diduduki dan dikuasai. Emir Kuwait Shaik Jabir al-Sabah dan keluarganya berhasil melarikan diri ke Arab Saudi dan disusul oleh hampir 300.000 orang Kuwait yang mengungsi ke Arab Saudi. Selanjutnya Irak membentuk Pemerintahan Propinsi Kuwait untuk menyiapkan alasan bahwa Irak telah diundang oleh rakyat Kuwait untuk mempertahankan revolusi Kuwait untuk melawan Keluarga Emir Kuwait. Dalam beberapa hari berikutnya Irak mengumumkan bahwa Irak telah menganeksasi Kuwait dan menyatakan bahwa Kuwait telah kembali menjadi Propinsi ke-19 Republik Irak.⁷³

Aneksasi Kuwait merupakan puncak ambisi Irak dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, yang mereka anggap telah dipisahkan oleh penjajah Inggris. Penggunaan simbol-simbol nasionalisme dan propaganda setelah invasi serta dikombinasikan dengan retorika persatuan nasional Arab yang digunakan Saddam Hussein diharapkan dapat mengalihkan perhatian invasi Irak terhadap Kuwait. Apa yang diharapkan Saddam Hussein tidak terjadi dan justru tindakan Irak itu mendapat reaksi keras dan kecaman dari Liga Arab dan PBB. Semua asset Irak dan Kuwait dibekukan, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk meminta Irak segera mundur dari Kuwait dan menyatakan embargo ekonomi dan perdagangan dengan Irak. Arab Saudi yang mengalami ketakutan akan dijadikan sasaran langsung maupun tidak langsung dari kekuatan militer Irak, segera meminta bantuan militer kepada Amerika Serikat. Atas permintaan Arab Saudi itulah Amerika Serikat segera membangun kekuatan militernya di kawasan Teluk.

Setelah pendudukan Kuwait, Saddam Hussein mengangkat keponalannya Ali Hassan al-Majid untuk menjadi Gubernur Kuwait. Sementara Saddam Hussein melakukan tindakan-tindakan untuk memperkuat reputasinya di kalangan Dunia Arab dan paling tidak menjadi pemimpin Nasionalis Arab.

⁷³ Trip, opcit, 243

Saddam Hussein mendapat dukungan dari Raja Hussein dari Yordania dan Pemimpin PLO Yasser Arafat sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dalam setiap pembicaraan mengenai masalah Kuwait, Saddam Hussein menghubungkan masalah Kuwait itu dengan konflik Arab-Israel. Sebelum invasi terhadap Kuwait, Saddam meyakinkan rakyatnya bahwa Israel mempunyai rencana untuk menyerang dan menghancurkan infrastruktur militer Irak. Saddam menyatakan telah terjadi sebuah konspirasi antara Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Irak, sementara itu mereka mendorong Kuwait untuk menghancurkan ekonomi Irak.⁷⁴

Pada tanggal 12 Agustus 1990 Saddam Hussein menawarkan inisiatif perdamaian. Irak akan mundur dari Kuwait, apabila semua wilayah pendudukan Israel di Timur Tengah dibebaskan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Israel harus mundur dari tanah Arab yang didudukinya di Palestina, Siria dan Libanon. Siria harus keluar dari Libanon, Namun tawaran perdamaian Saddam Hussein ditolak oleh pihak Barat.⁷⁵ Pada bulan September para politisi dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis membuat pernyataan bahwa Konferensi Perdamaian untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel akan dilaksanakan, apabila Irak telah mundur dari Kuwait. Menghadapi berbagai tekanan internasional Saddam Hussein menggunakan taktik mengadu domba antar negara-negara besar yang menentangnya. Saddam Hussein memberikan jaminan suplai minyak gratis bagi Uni Soviet, agar Uni Soviet mendukung Irak. Dengan tawaran itu Presiden Uni Soviet Mikail Gorbachev menyatakan perlunya memberi ruang manuver bagi Saddam Hussein untuk menyelesaikan masalah Kuwait. Dengan Perancis, Saddam Hussein membebaskan pekerja Perancis yang tertahan di Irak selama invasi terhadap Kuwait dan Presiden Perancis Francois Mitterand dalam pidatonya di PBB menyatakan bahwa Perancis mengakui kedaulatan Irak atas Kuwait. Namun pada hari-hari berikutnya Perancis melalui Menteri Luar Negerinya Roland Dumas mendukung upaya Amerika Serikat dan Inggris untuk mengusir Irak dari Kuwait.⁷⁶

Disamping itu Saddam Hussein juga menggunakan taktik tameng manusia (*human shield*) untuk melindungi ancaman militer Barat. Untuk itu pada

⁷⁴ Coughlin, opcit, hal. 257

⁷⁵ Ibid, hal. 258

⁷⁶ Simpson, opcit, hal 136

akhir Agustus 1990 Saddam Hussein mengeluarkan perintah bahwa semua pekerja asing ditahan di Irak hingga ancaman militer terhadap Irak berakhir. Taktik Saddam Hussein itu dilakukan untuk menguji keberanian negara-negara yang tergabung dalam koalisi untuk membebaskan Kuwait. Kalkulasi strategik Saddam Hussein adalah pihak Barat tidak akan membombardir instalasi pemerintah dan fasilitas militer apabila disana ada sandera orang asing. Namun taktik Saddam Hussein ini tidak ditanggapi oleh negara-negara yang tergabung dalam koalisi dan bahkan pada tanggal 29 Nopember 1990 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang meminta Irak Keluar dari Kuwait tanpa syarat paling lambat tanggal 15 Januari 1991 dan memberikan mandat untuk menggunakan kekuatan militer apabila Irak tidak mematuhi⁷⁷.

Dalam menghadapi ancaman militer pihak koalisi Saddam Hussein memperkuat posisinya di dalam negeri dengan mengganti dan mengangkat orang-orang dekatnya pada posisi kunci. Ali Hassan al-Majid ditarik dari Kuwait untuk membantu perencanaan pertahanan negara, Hussein Rashid al-Tikriti diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yang sebelumnya sebagai Komandan Pengawal Istana dan Komandan Garda Republik. Beberapa Divisi Garda Republik telah ditempatkan di seluruh wilayah Irak untuk melindungi Pusat Kekuasaan di Wilayah Tengah dan Utara serta untuk melindungi invasi militer dari Selatan. Adik-adik Saddam Hussein, Barzan, Wardan dan Sabawi menduduki jabatan dalam Badan Intelijen Negara untuk menghadapi ancaman dalam negeri. Dengan demikian Saddam Hussein yakin bahwa dia dapat bertahan untuk melindungi negara dan kekuasaannya.⁷⁸

Pada bulan Nopember 1990 ketika Amerika Serikat memperoleh mandat untuk menggunakan kekuatannya, Presiden George Bush Senior mengirim Menlu James Baker ke Bagdad dan menerima Wakil Perdana Menteri Irak Tariq Aziz di Washington. Walaupun Amerika Serikat mendesak Irak untuk mundur dari Kuwait, namun Amerika Serikat juga mengajukan inisiatif yang tak terduga sebelumnya yaitu memberikan solusi untuk menghindari rasa malu Saddam Hussein. Sejak terjadinya krisis Kuwait Saddam Hussein telah meminta negosiasi langsung dengan Amerika Serikat dan dia dapat membaca bahwa penawaran Presiden Bush itu sebagai konsesi yang baik bagi Irak. Dalam

⁷⁷ Coughlin, opcit hal. 261

⁷⁸ Ibid, hal. 262

menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan untuk memperlunak sikap Amerika Serikat, Saddam Hussein memerintahkan untuk membebaskan semua sandera asing yang ada Irak maupun di Kuwait. Namun perkiraan Saddam Hussein bertolak belakang dengan kenyataan yang dihadapinya. Amerika Serikat tidak memberikan konsesi apapun dan justru pada tanggal 17 Januari 1991 Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat melakukan bombardemen terhadap instalasi pemerintah dan militer Irak sebagai pertanda negosiasi dan diplomasi gagal dan perang tidak bisa dielakan lagi.

Dari penjelasan diatas faktor-faktor yang mendorong Irak untuk melakukan invasi terhadap Kuwait adalah latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak. Latar belakang sejarah Irak telah menunjukkan bahwa sengketa antara Irak dan Kuwait telah ada sejak lama. Pada jaman Kesultanan Ottoman Kuwait merupakan bagian Propinsi Basrah yang merupakan salah satu propinsi Irak. Oleh karena itu Irak bersikeras bahwa Kuwait tidak bisa dilepaskan dari Irak. Pemisahan Kuwait dari Irak mulai terlihat ketika Kuwait menjadi protektorat Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Pendudukan Inggris terhadap Kuwait lebih diperkuat lagi setelah diketahui bahwa Kuwait memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Inggris selalu berusaha melindungi Kuwait bila terlihat ada indikasi Irak akan menguasai Kuwait. Ketika Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961, Irak menolak dengan keras dan mengancam akan menyerang Kuwait. Namun Inggris segera mengirim pasukan militernya ke Kuwait untuk melindungi Kuwait dari serangan militer Irak. Dengan kehadiran kekuatan militer Inggris di Kuwait, akhirnya Irak tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tahun 1963 Irak mengakui kemerdekaan Kuwait. Namun api perselisihan antara Irak dan Kuwait masih terus berlanjut dan puncak perselisihan antara kedua negara itu terjadi ketika Presiden Irak Saddam Hussein memerintah Republik Irak. Saddam Hussein kembali menyatakan bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak yang telah dipisahkan oleh kolonialis Inggris, untuk itu harus direbut kembali.

Perang Delapan Tahun antara Irak dan Iran telah mengakibatkan kehancuran ekonomi dan infrastruktur Irak. Untuk membangun kembali perekonomian dan rekonstruksi infrastruktur Irak membutuhkan dana yang sangat besar. Satu-satunya sumber dana yang dimiliki Irak hanyalah dari hasil minyak, padahal pada saat itu harga minyak sangat rendah, sehingga tidak mampu mendukung kebutuhan Irak. Dalam menghadapi kesulitan ekonominya. Irak meminta bantuan ekonomi Arab Saudi dan

Kuwait, namun kedua negara itu tidak menanggapinya. Irak menuntut agar Kuwait memberikan ganti rugi dan kompensasi dari ladang minyak di Ratga yang dekat dengan ladang minyak Rumaillah. Tuntutan Irak itu diikuti dengan ancaman kekerasan. Karena Kuwait tetap tidak mau memenuhi tuntutan Irak, maka hal itu juga merupakan salah satu pendorong Irak untuk melakukan invasi terhadap Kuwait.

Ambisi Saddam Hussein untuk menjadi Pemimpin Bangsa Arab tidak diragukan lagi. Dalam berbagai kesempatan Saddam Hussein selalu memperlihatkan ambisinya itu. Untuk memenuhi ambisinya itu Saddam Hussein memperkuat Angkatan Bersenjata dan perekonomian Irak. Sebelum perang dengan Iran pada tahun 1980-1988, Irak telah menjelma menjadi negara yang kuat dan kaya. Hal inilah yang mendorong Saddam Hussein untuk memenuhi ambisinya. Perang Irak dengan Iran menunjukkan bahwa Saddam Hussein berusaha menampilkan dirinya sebagai pahlawan untuk melindungi Bangsa Arab yang mayoritas Sunni dari dominasi bangsa Persia yang mayoritas Shiah. Namun tindakan Irak itu justru menghancurkan perekonomian dan infrastruktur negaranya. Akibatnya Saddam Hussein harus membangun kembali perekonomian Irak yang hancur untuk tetap memenuhi ambisinya. Salah satu upaya Saddam Hussein untuk memudahkan akses ke laut adalah menguasai Kuwait, agar kebutuhan ekspor dan impor dari dan ke Irak dapat berjalan lancar. Karena Kuwait telah menjadi Negara merdeka dan salah satu anggota PBB, maka Irak dengan segala cara dan menggunakan berbagai tuduhan berupaya menguasai Kuwait. Inilah juga salah satu pendorong invasi Irak terhadap Kuwait.

Kulminasi dari konflik antara Irak dan Kuwait adalah invasi militer yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait. Invasi militer dilancarkan dalam waktu yang sangat singkat dan dalam waktu 24 jam seluruh wilayah Kuwait dapat dikuasai oleh tentara Irak. Setelah Kuwait dapat diduduki, Irak menganeksasi Kuwait dan menyatakan bahwa Kuwait sebagai Propinsi ke-19 Irak. Kecaman dan tekanan internasional atas tindakan invasi Irak, tidak membuat Saddam Hussein menarik mundur pasukannya. Demikian juga resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dianggap angin lalu oleh Irak. Justru Irak menggunakan kasus Kuwait sebagai kekuatan tawar (*bargaining power*) agar Israel keluar dari tanah-tanah Arab yang didudukinya sejak tahun 1967. Irak juga menggunakan pekerja asing sebagai sandera dan digunakan sebagai tameng manusia (*human shield*). Namun tindakan Irak itu menambah kemarahan pihak Barat terutama Amerika Serikat. PBB dan negara-negara besar terutama Amerika Serikat terus melakukan diplomasi dan tekanan-tekanan terhadap Irak, namun Irak tetap pada

pendiriannya dan tidak mau mundur dari Kuwait. Karena Irak hingga batas waktu yang ditentukan tidak mau mematuhi Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB, maka tindakan militer terhadap Irak tidak dapat dihindarkan lagi.



BAB III

UPAYA PERDAMAIAN INTERNASIONAL

Seluruh dunia mengecam tindakan Irak menginvasi Kuwait, karena Irak telah melanggar ketentuan dan peraturan internasional yang telah disepakati bersama. Oleh karena itulah Bab ini akan menjelaskan tentang reaksi dan upaya internasional untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Bab ini juga akan menjelaskan tentang Piagam PBB dengan maksud agar diperoleh sebuah pemahaman tentang ketentuan dan peraturan internasional yang harus dipatuhi oleh semua anggota PBB namun telah dilanggar oleh Irak. Adapun upaya perdamaian yang dilakukan oleh PBB merupakan tugas dan tanggung jawab PBB untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Proses kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait sangat dipengaruhi oleh negara-negara besar terutama Amerika Serikat.

A. Reaksi dan Upaya Internasional.

Invasi Irak terhadap Kuwait sangat mengejutkan dunia internasional. Saddam Hussein tidak mau lagi bernegosiasi dengan Keluarga Emir Kuwait Al-Sabah. Demikian juga Presiden Mesir Housni Mubarak merasa tertipu oleh Saddam Hussein, karena beberapa hari sebelum invasi Saddam Hussein berjanji kepada Presiden Housni Mubarak tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konfliknya dengan Kuwait⁷⁹. Reaksi internasional berbeda-beda, Inggris mengutuk invasi Irak dan menginginkan tindakan yang tegas dan keras terhadap Irak. Inggris selalu memelihara komitmen yang kuat terhadap negara-negara Teluk, seperti pada tahun 1961 Inggris memberikan jaminan kedaulatan Kuwait dari agresi militer Irak. Amerika Serikat yang awalnya sangat berhati-hati untuk mengambil tindakan, namun atas desakan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher akhirnya Amerika Serikat mengecam Irak dan meminta Irak untuk segera keluar dari Kuwait tanpa syarat. PBB sebagai penanggungjawab keamanan dan perdamaian internasional bergerak cepat dan beberapa jam setelah invasi Irak Dewan Keamanan PBB melakukan sidang darurat dan

⁷⁹ Aburish, opcit, hal. 281

mengeluarkan Resolusi 660 yang mengecam tindakan Irak dan meminta Irak segera keluar dari Kuwait.

Uni Soviet dan Jepang yang mempunyai hubungan kuat dengan Irak di bidang ekonomi meminta agar penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait dilakukan dengan cara-cara damai. Sebagian besar negara-negara di dunia setuju bahwa tindakan Irak adalah salah, namun untuk menyelesaikan masalah invasi Irak diperlukan cara-cara damai dan diplomasi. Raja Hussein dari Yordania setelah konsultasi dengan Pemimpin Arab segera ke Bagdad untuk menemui Saddam Hussein. Pada pertemuan itu Saddam Hussein menyatakan akan menarik pasukannya dari Kuwait bila Liga Arab tidak mengecamnya. Amerika Serikat memberikan waktu 48 jam bagi pemimpin Arab untuk menyelesaikan invasi Irak dengan cara-cara Bangsa Arab. Setelah dilakukan diplomasi secara intens oleh Amerika Serikat terhadap Uni Soviet, Menlu Amerika Serikat dan Menlu Uni Soviet yang bertemu di Irkutsk Siberia bersama-sama menyatakan agar Irak segera keluar dari Kuwait tanpa syarat, mengembalikan kedaulatan Kuwait, membekukan semua asset Irak dan Kuwait dan menghentikan pasokan persenjataan kepada Irak. Pernyataan mereka ditegaskan kembali di Moskow keesokan harinya. Berdasarkan Resolusi 660 Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat meminta Arab Saudi dan Turki untuk menutup pipa minyak Irak yang mengalirkan minyaknya ke negara mereka. Bersamaan dengan itu Amerika Serikat memerintahkan Angkatan Lautnya segera menuju Kawasan Teluk.⁸⁰

Para Menlu negara-negara Arab melakukan pertemuan darurat di Kairo untuk membahas penyelesaian invasi Irak dan menolak intervensi asing dalam menyelesaikan perselisihan antar negara Arab. Mendengar laporan Raja Hussein atas hasil pertemuannya dengan Saddam Hussein, semua peserta pertemuan sepakat untuk menahan diri dan meminta adanya pertemuan puncak terbatas antara Presiden Saddam Hussein, Raja Fahd dari Arab Saudi, Raja Hussein dan Presiden Housni Mubarak pada tanggal 5 Agustus 1990 di Arab Saudi. Namun keesokan harinya atas permintaan dan tekanan Amerika Serikat, Presiden Housni Mubarak justru mengecam Saddam Hussein dan meminta Irak untuk segera keluar dari Kuwait tanpa syarat. Hal itu terjadi setelah Raja Fahd menawarkan solusi cara-cara Arab dan menolak penempatan pasukan asing di negaranya. Presiden Mubarak telah melecehkan dan memojokan Saddam Hussein dan hal itu membahayakan usulan perdamaian yang ditawarkan dalam pertemuan Kairo tanggal 3 Agustus 1990. Mubarak sangat marah karena Saddam Hussein tidak

⁸⁰ Ibid, hal. 286

memegang janjinya untuk tidak akan melakukan invasi terhadap Kuwait. Saddam Hussein bereaksi keras atas pernyataan Mubarak tersebut, sehingga Arab Saudi ketakutan dan mempertimbangkan untuk meminta bantuan asing⁸¹.

Pada tanggal 4 Agustus 1990 Presiden Mubarak menyatakan persetujuannya untuk Pertemuan Puncak terbatas kepada Yasser Arafat, namun Mesir justru memperkuat kecemasannya terhadap Irak dengan mengirim pasukannya ke Arab Saudi. Pengiriman pasukan Mesir ke Arab Saudi ini merupakan tindakan Presiden Housni Mubarak yang memungkinkan negara-negara Arab bergabung dengan Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat.⁸² Tindakan Mesir itu merupakan sebuah pengujian komitmen dan keinginan kedua kepala negara Mesir dan Irak. Gagasan untuk melaksanakan pertemuan puncak terbatas akhirnya gagal, karena Arab Saudi mengikuti langkah Mesir dengan meminta Irak untuk keluar dari Kuwait tanpa syarat sebelum pertemuan puncak dilaksanakan. Pada tanggal 5 Agustus 1990 dalam upaya untuk melepaskan dirinya dari krisis yang diciptakannya, Saddam Hussein yang didukung oleh China menarik sebagian pasukannya dari Kuwait.⁸³ Sepuluh ribu tentara Irak termasuk unit Pasukan Garda Republik ditarik dari Kuwait. Satu hari setelah penarikan itu, Saddam Hussein bertemu dengan diplomat Amerika Serikat di Bagdad mengatakan bahwa Irak tidak berniat untuk menginvasi Arab Saudi dan memberikan isyarat untuk kemungkinan penarikan pasukannya dari Kuwait. Ketika Presiden Mubarak dan Presiden Bush menolak isyarat yang disampaikan Saddam Hussein dan tetap meminta Irak keluar dari Kuwait, Saddam Hussein mengirim sebelas Divisi Infantri untuk memperkuat pasukannya di Kuwait. Raja Fahd yang semula lebih suka menggunakan pasukan Arab daripada pasukan asing untuk melindungi negaranya mulai berubah dan mengikuti jejak Mesir yang menengok ke Amerika Serikat.⁸⁴

Pada tanggal 6 Agustus 1990 Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang sedang berada di Amerika Serikat melaksanakan pertemuan dengan Presiden George Bush meminta dengan keras kepada Amerika Serikat untuk mengambil tindakan tegas terhadap Irak. Pada tanggal 7 Agustus 1990 Menhan Amerika Serikat Dick Cheney menemui Raja Fahd untuk meminta agar pasukan Amerika Serikat dapat ditempatkan di Arab Saudi untuk menghadapi invasi Irak selanjutnya. Untuk meyakinkan Raja Fahd, Menhan Dick Cheney membawa semua foto satelit yang menunjukkan pasukan Irak

⁸¹ Ibid, hal. 287

⁸² Simpson, opcit, hal. 144

⁸³ Aburish, opcit, hal. 287

⁸⁴ Ibid, hal. 287

yang telah berada di perbatasan dengan Arab Saudi dan akan mengancam Arab Saudi. Atas dasar itulah Raja Fahd akhirnya mengeluarkan mandat untuk mengundang pasukan asing ke negaranya. Presiden Bush menyatakan bahwa kehadiran tentara Amerika Serikat di Arab Saudi sepenuhnya untuk mempertahankan Arab Saudi seperti yang dikehendaki Raja Fahd. Pada tanggal 10 Agustus 1990 Liga Arab mengadakan pertemuan puncak di Kairo yang dihadiri Pimpinan Pemerintahan negara-negara Arab dan dari Irak hadir Wakil Presiden Taha Yassin Ramadan dan Wakil Perdana Menteri Tariq Azis. Pada pertemuan itu dilakukan pemungutan suara tentang perlunya mengirim pasukan Arab ke Arab Saudi dan hasilnya menyatakan bahwa Liga Arab menyetujui untuk mengirim tentara Arab ke Arab Saudi untuk mendukung tentara Amerika Serikat yang ditempatkan disana⁸⁵. Sementara itu Amerika Serikat menolak usaha negosiasi Saddam Hussein untuk menarik pasukannya dari Kuwait dengan kompensasi yang dikehendakinya.⁸⁶

Pada tanggal 12 Agustus 1990 Saddam Hussein mengumumkan bahwa Irak akan menarik pasukannya dari Kuwait sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB apabila Israel menarik pasukannya dari wilayah-wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1967. Untuk menarik perhatian dunia internasional pada akhir Agustus dan awal September 1990 Saddam Hussein menarik sebagian pasukannya dari Kuwait. Pada tanggal 31 Agustus 1990 Sekjen PBB Perez de Cuellar melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Irak Tariq Aziz di Amman dan hanya menyampaikan bahwa untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Irak, PBB memerlukan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pertemuan itu tidak membawakan hasil apa-apa dan tidak ada kemajuan dalam penyelesaian kasus invasi Irak. Pada tanggal 1 September Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher menyatakan bahwa Saddam Hussein harus dinyatakan sebagai penjahat perang atas kejahatan kemanusiaan. Sementara itu Menhan Arab Saudi Pangeran Sultan menyatakan bahwa tentara Amerika Serikat yang ada di Arab Saudi tidak akan digunakan untuk menyerang Irak. Pada tanggal 9 September 1990 Presiden Bush dan Presiden Gorbachev melakukan pertemuan di Helsinki yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk melawan Irak dan Uni Soviet memberikan lampu hijau kepada Amerika Serikat untuk bertindak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB. Tabel 1 menunjukkan reaksi dari negara-negara yang berkepentingan

⁸⁵ Ibid, hal. 290

⁸⁶ Lando, opcit, hal. 142

atas terjadinya invasi Irak sebelum dan sesudah dipengaruhi oleh negara-negara besar yang mengecam tindakan invasi Irak.

Tabel 1
Reaksi Internasional terhadap Invasi Irak *)

No.	Negara	Reaksi Awal	Reaksi Akhir	Keterangan
1.	Amerika Serikat	Menunggu	Mengecam Keras	Setelah didesak Inggris
2.	Inggris	Mengecam Keras	Mengecam Keras	Karena kepentingannya terancam
3.	Perancis	Mendukung	Mengecam Irak	Setelah dipengaruhi oleh AS
4.	Uni Soviet	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah dapat kompensasi dari AS dan Arab Saudi
5.	China	Menunggu	Abstain di DK PBB	Setelah dapat kompensasi dari AS
6.	Jepang	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah dipengaruhi oleh AS
7.	Jerman	Mengecam Irak	Mengecam Irak	Karena kepentingannya terancam
8.	Mesir	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah mendapat tekanan dan kompensasi dari AS dan Negara Teluk
9.	Arab Saudi	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah mendapat tekanan dari AS
10.	Siria	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah mendapat jaminan dan kompensasi dari Uni Eropa dan negara Arab
11.	Yordania	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Dukungan minyak dari Irak dan menghadapi serangan Israel
12.	Yaman	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Menolak tekanan AS
13.	Kuba	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Menolak tawaran AS
14.	Palestina	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Memperoleh dukungan diplomatik dan dana dari Irak
15.	Indonesia	Mengecam	Mengecam	Irak melanggar Piagam PBB

*) Sumber : *Diolah dari berbagai sumber*

Upaya diplomasi terus dilakukan, Mantan Perdana Menteri Inggris Edward Heat, Politisi Yugoslavia Budimin Loncar, Pendeta Jesse Jackson, Mantan Gubernur Texas John Connolly dan Mantan Perdana Menteri Jerman Barat Willy Brand masing-masing bertemu dengan Saddam Hussein dalam upaya membantu penyelesaian krisis dan

membebaskan sandera yang ditahan oleh Irak⁸⁷. Pada kesempatan itu Saddam Hussein menyampaikan keinginannya untuk menarik pasukannya dari Kuwait. Para diplomat itu kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa sandera yang dibebaskan oleh Irak sebagai hadiah. Saddam Hussein menyatakan bahwa seluruh sandera asing akan dibebaskan sebelum Hari Natal 1990. Berdasarkan sumber dari PLO, Saddam Hussein memberikan otorisasi kepada kerabatnya Yasser Arafat yang mempunyai koneksi dengan Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan damai. Namun Amerika Serikat menolak mentah-mentah.⁸⁸ Upaya diplomasi terakhir untuk menyelesaikan konflik dilakukan oleh Amerika Serikat pada akhir bulan Nopember 1990. Presiden George Bush mengirim Menlu James Baker ke Bagdad dan menerima Wakil Perdana Menteri Irak Tariq Aziz di Washington. Hasil dari upaya diplomasi itu seluruh sandera asing dibebaskan oleh Irak. Namun Amerika Serikat tetap dengan pendiriannya yang menuntut agar Irak harus segera keluar dari Kuwait tanpa syarat sesuai dengan Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB.

B. Piagam PBB

Piagam PBB adalah perjanjian yang membentuk dan membangun organisasi internasional yang dinamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB ini ditandatangani oleh 50 dari 51 negara anggota PBB (Polandia pada saat itu tidak mengirimkan wakilnya namun menandatangani kemudian) pada Konferensi PBB di San Fransisco, California, Amerika Serikat pada tahun 1945. Mulai diberlakukan pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh anggota tetap PBB yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan China serta beberapa negara besar lainnya.

Tujuan PBB sesuai dengan Pasal 1 Bab I Piagam PBB adalah *pertama*, memelihara keamanan dan perdamaian internasional, melakukan tindakan terhadap agresi atau yang melanggar perdamaian dan melakukannya dengan cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian situasi atau perselisihan internasional yang dapat mengarah kepada pelanggaran internasional; *kedua*, membangun hubungan persahabatan antar negara berdasarkan penghormatan terhadap prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri, dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperkuat perdamaian dunia;

⁸⁷ Aburish, *opcit*, hal. 293

⁸⁸ *Ibid*, hal. 293

ketiga, mewujudkan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau karakter kemanusiaan, mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua tanpa ada perbedaan ras, gender, bahasa atau agama; *keempat*, menjadi pusat harmonisasi tindakan semua negara dalam mencapai tujuan bersama ini.⁸⁹

Sedangkan Pasal 2 Bab I menegaskan bahwa PBB dan seluruh anggotanya dalam melaksanakan tujuan PBB harus melakukan tindakan yang berdasarkan prinsip-prinsip : 1) Organisasi berdasarkan prinsip kesamaan kedaulatan bagi semua anggota, 2) Semua anggota, agar supaya dapat menjamin hak dan keuntungan bagi semua sebagai hasil dari keanggotaannya, harus memenuhi kewajiban-kewajiban dengan baik yang dibebankan yang berkaitan dengan Piagam ini, 3) Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara-cara damai sehingga tidak membahayakan keamanan dan perdamaian internasional dan keadilan, 4) Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan setiap negara atau perilaku lain yang bertentangan dengan Tujuan PBB, 5) Semua anggota harus memberikan bantuan kepada PBB dalam setiap tindakannya yang berkaitan dengan Piagam ini dan harus menahan diri untuk memberikan bantuan kepada setiap negara yang dimana PBB sedang melakukan tindakan pencegahan atau penindakan, 6) Organisasi harus menjamin negara bukan anggota PBB yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ini sejauh untuk kepentingan memelihara keamanan dan perdamaian internasional, 7) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam ini, PBB diberikan otorisasi untuk ikut campur dalam hal-hal yang mendasar di dalam yurisdiksi domestik setiap negara atau harus mewajibkan setiap anggota untuk menyampaikan masalahnya untuk diselesaikan berdasarkan Piagam ini, akan tetapi prinsip ini tidak boleh merugikan penggunaan cara-cara penegakan sesuai Bab ini.⁹⁰

Piagam PBB yang berkaitan dengan tindakan yang berhubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi tercantum dalam Bab VII Piagam PBB. Bab VII Piagam PBB berisi : Pasal 39, Dewan Keamanan akan menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran

⁸⁹ “*United Nations Charter*”, http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Charter, hal 1-2

⁹⁰ *Ibid*, hal 2-3

perdamaian atau tindakan agresi dan akan memberikan rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan Pasal 41 dan 42, memelihara atau mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional; Pasal 40, untuk mencegah situasi yang mengganggu, Dewan Keamanan sebelum membuat rekomendasi atau menentukan cara-cara yang diperlukan sesuai Pasal 39 akan meminta semua pihak yang berkepentingan untuk mentaati tindakan sementara yang dianggap penting dan diperlukan. Tindakan sementara itu harus tidak merugikan hak, tuntutan, atau posisi pihak yang berkepentingan. Dewan Keamanan sepatutnya mengindahkan kegagalan untuk mentaati tindakan sementara itu; Pasal 41, Dewan Keamanan akan menentukan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer yang dikerahkan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusannya, dan akan meminta semua anggota PBB untuk melaksanakan tindakan itu. Tindakan ini termasuk seluruhnya atau sebagian pemutusan hubungan ekonomi dan perhubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan komunikasi lainnya dan pemutusan hubungan diplomatik; Pasal 42, Apabila Dewan Keamanan mempertimbangkan bahwa tindakan yang diperlukan pada Pasal 41 tidak akan cukup dan ternyata tidak cukup, maka Dewan Keamanan akan mengambil tindakan dengan menggunakan kekuatan darat, laut dan udara bila diperlukan untuk memelihara atau mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional. Tindakan itu mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lainnya yang menggunakan kekuatan darat, laut dan udara dari anggota PBB.⁹¹

Pasal 43 menyatakan bahwa semua Anggota PBB dalam memberikan kontribusinya untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, menyediakan pasukan militer, asistensi, dan fasilitas termasuk hak melintas bagi Dewan Keamanan PBB sesuai dengan perjanjian atau perjanjian khusus yang diperlukan untuk tujuan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Perjanjian atau perjanjian-perjanjian itu akan menentukan jumlah dan jenis pasukan, tingkat kesiapan dan lokasi umum dan kondisi fasilitas dan asistensi yang disediakan. Perjanjian atau perjanjian-perjanjian itu akan dinegosiasikan secepatnya atas inisiatif Dewan Keamanan. Hal itu akan diselesaikan antara Dewan Keamanan dan Anggota atau antara Dewan Keamanan dan Kelompok Anggota dan tergantung kepada ratifikasi negara-negara yang menandatangani sesuai dengan proses konstitusi masing-masing; Pasal 44, Apabila Dewan Keamanan telah memutuskan penggunaan kekuatan sebelum meminta Anggota yang tidak terwakili untuk menyediakan pasukan bersenjata dalam menunaikan

⁹¹ “*Charter of The United Nations: Chapter VII*”, <http://un.org/aboutun/charter/chapter7.htm>, hal 1

kewajiban sesuai Pasal 43, maka Dewan Keamanan mengundang Anggota Itu bila bersedia untuk berpartisipasi dalam melaksanakan keputusan Dewan Keamanan tentang pengerahan kontingen pasukan bersenjata negara Anggota; Pasal 45, agar PBB mampu mengambil tindakan militer, Anggota harus segera menyediakan kontingen angkatan udara untuk melakukan tindakan penegakan gabungan internasional. Kekuatan dan tingkat kesiapan kontingen ini dan rencana tindakan gabungan itu akan ditentukan oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer dalam batas yang tercantum dalam perjanjian atau perjanjian khusus sesuai dengan Pasal 43; Pasal 46, rencana penggunaan pasukan bersenjata dibuat oleh Dewan Keamanan PBB dengan bantuan Komite Staf Militer.⁹²

Dalam Piagam PBB diatas sangat jelas bahwa seluruh anggota PBB yang telah menandatangani dan meratifikasi Piagam itu mempunyai komitmen dan keinginan yang kuat bahwa keamanan dan perdamaian internasional harus diwujudkan bersama. Setiap ada perselisihan ataupun konflik yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian internasional harus dapat dicegah atau diakhiri. Penyelesaian setiap konflik yang terjadi hendaknya diselesaikan dengan cara-cara damai melalui diplomasi internasional. Namun apabila cara-cara damai dan diplomasi internasional tidak juga mendatangkan hasil, maka penggunaan kekuatan militer dapat dibenarkan sejauh untuk memelihara dan mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional. Upaya penyelesaian konflik internasional dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan resolusi-resolusi yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa dan oleh seluruh negara anggota PBB sesuai dengan peraturan internasional yang tercantum dalam Piagam PBB.

C. Upaya Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pada jam 01.00 waktu Irak tanggal 2 Agustus 1990 Irak melancarkan invasi militer terhadap Kuwait dan beberapa jam setelah itu secara cepat Dewan Keamanan PBB melakukan sidang darurat di Markas besarnya di New York. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB itu seluruh anggota tetap dan anggota tidak tetap melakukan pemungutan suara untuk merespon tindakan invasi Irak. Dengan hasil pemungutan suara empat belas lawan nol, sedangkan Kuba dan Yaman abstain.⁹³ Dengan hasil itu

⁹² “*Charter of The United Nations-Chapter VII*”, ibid, hal 2-3

⁹³ Simpson, opcit, hal. 133

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 660 yang meminta penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait secepatnya dan tanpa syarat. Menghadapi resolusi 660 itu, Saddam Hussein mengatakan keinginannya kepada Raja Hussein dari Yordania bahwa dia menjamin akan menarik pasukannya dari Kuwait apabila Liga Arab tidak mengecam tindakan invasinya. Namun pada pertemuan darurat para Menlu Arab di Kairo pada tanggal 5 Agustus 1990, Presiden Mesir Housni Mubarak menyatakan secara terbuka meminta Irak harus segera keluar dari Kuwait tanpa syarat. Hal itu membuat Saddam Hussein pada posisi yang terjepit dan tetap pada pendiriannya bahwa Kuwait adalah bagian dan salah satu propinsi dari Irak.

Karena Irak tidak mau mematuhi Resolusi 660 Dewan Keamanan PBB, maka pada tanggal 6 Agustus 1990 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 661 yang berisi pemberian embargo ekonomi dan perdagangan terhadap Irak kecuali untuk kebutuhan suplai medis dan bahan makanan untuk kemanusiaan. Resolusi 661 itu juga berisi pembentukan Komite Sanksi Khusus untuk memantau pelaksanaan embargo. Resolusi inipun tidak digubris oleh Irak dan Irak tetap tidak mau mundur dari Kuwait. Untuk memperkuat embargo itu Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Agustus 1990 mengeluarkan Resolusi 665 yang berisi untuk mengambil tindakan yang sepadan dalam situasi tertentu agar embargo terhadap Irak dapat dipatuhi. Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan Resolusi 666 pada tanggal 13 September 1990 yang memberikan hak kepada Komite Sanksi Khusus untuk melakukan investigasi apakah kebutuhan kemanusiaan di Irak dan distribusi makanan untuk rakyat Irak yang berhubungan dengan Palang Merah dan Badan Kemanusiaan lainnya.⁹⁴ Disamping itu Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan Resolusi 662 yang berisi penegasan kembali agar Irak segera keluar dari Kuwait tanpa syarat dan Resolusi 664 yang berisi agar Irak melindungi warga negara asing yang berada di Irak maupun Kuwait yang ditegaskan kembali dalam Resolusi 666 agar Irak menghormati Konvensi Jenewa dan Resolusi 677 yang berisi kecaman terhadap Irak atas upaya Irak untuk merubah komposisi demografi penduduk Kuwait dan menghancurkan catatan sipil yang dipelihara oleh pemerintah Kuwait.

Disamping upaya dengan mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Perez de Cuelar juga melakukan langkah-langkah diplomasi untuk mencari penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Pada tanggal 31 Agustus 1990 Sekjen PBB melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Irak

⁹⁴ Cordesman and Hashim, *opcit*, hal. 138

Tariq Azis di Amman Yordania. Sekjen PBB hanya menegaskan bahwa PBB berharap Irak mematuhi resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB agar konflik Irak dan Kuwait dapat diselesaikan dengan cara-cara damai. Dia juga menegaskan bahwa kemungkinan penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait masih memerlukan resolusi Dewan Keamanan PBB.⁹⁵ Dalam pertemuan itu tidak ada kemajuan yang berarti, karena Irak tetap pada pendiriannya dan tidak mau mematuhi resolusi PBB yang telah dikeluarkan dan PBB tidak dapat melakukan apa-apa kecuali meminta agar Irak mematuhi dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan.

Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan sama sekali tidak dipatuhi oleh Irak dan Presiden Saddam Hussein justru memperkuat posisinya di Kuwait dengan menyatakan bahwa Kuwait merupakan Propinsi ke-19 Irak dan mengangkat Gubernur Kuwait. Karena Irak tetap tidak mau mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, maka pada tanggal 29 Nopember 1990 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat kepada negara anggota PBB untuk menggunakan segala cara (*to use all necessary means*) agar Irak keluar dari Kuwait dan apabila Irak tidak melakukannya hingga tanggal 15 Januari 1991, maka resolusi menyatakan Irak telah melakukan pelanggaran nyata (*flagrant contempt*) terhadap Dewan Keamanan PBB. Batas waktu yang diberikan adalah untuk memberikan kesempatan terakhir bagi Irak untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Kuwait. Resolusi 678 itu merupakan keberhasilan diplomasi Amerika Serikat dalam forum Dewan Keamanan PBB, walaupun menggunakan ancaman, tekanan, pendekatan dan penyogokan terhadap anggota Dewan Keamanan PBB. Pendekatan dan diplomasi Amerika Serikat kepada setiap anggota tetap maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB berbeda-beda. Kepada Kolombia misalnya Amerika Serikat menjanjikan untuk menghentikan pelarangan impor bunga dari Kolombia. Kepada China, Amerika Serikat akan menghapuskan atas catatan pelanggaran hak asasi manusia di China. Untuk Uni Soviet, Amerika setuju untuk membantu mencegah negara-negara Baltik untuk menghadiri konferensi internasional yang akan datang dan Arab Saudi memberikan pinjaman 4 Milyar US Dollar kepada Uni Soviet. Sedangkan kepada Yaman yang menentang resolusi 678, Amerika Serikat membatalkan bantuan sebesar 70 Juta US Dollar. Demikian juga Amerika Serikat menawarkan kepada Kuba bahwa Amerika Serikat akan mencabut Kuba dari daftar negara teroris, namun tawaran itu ditolak oleh

⁹⁵ Aburish, opcit, hal. 291, 292

Kuba⁹⁶. Dengan kondisi itu Dewan Keamanan PBB akhirnya dapat meloloskan Resolusi 678 dengan pemungutan suara 12 suara mendukung lawan dua suara yang menolak (Kuba dan Yaman) dan satu abstain yaitu China. Walaupun demikian disini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak tanpa dukungan Amerika Serikat.

Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan akan tetap sebagai resolusi diatas kertas dan tidak dapat dilaksanakan apabila PBB tidak memiliki Unsur Penegak Hukum (*Law Machinery*). Walaupun resolusi 678 Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan, namun apabila tidak ada negara anggota yang mau melibatkan pasukan militernya dalam operasi militer PBB, maka resolusi itu hanya merupakan perintah yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itulah diperlukan adanya kekuatan internasional yang dapat menghimpun kekuatan negara-negara anggota PBB agar dapat membangun sebuah kekuatan militer yang besar dan dapat mengusir Irak dari Kuwait. Dalam situasi seperti itulah Amerika Serikat tampil sebagai negara adikuasa yang mampu menghimpun kekuatan militer internasional dengan membangun koalisi internasional. Amerika Serikat dengan kekuatan dan kemampuannya menggelar kekuatan militer di Kawasan Teluk dan berhasil meyakinkan dunia internasional untuk bergabung dalam Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait. Proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB tersebut diatas merupakan suatu bukti adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat.

Reaksi keras dunia internasional dan PBB terhadap invasi Irak terhadap Kuwait merupakan wujud nyata dari keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan Piagam PBB. Tujuan PBB seperti yang tercantum dalam Piagam PBB menyatakan salah satu Tujuan PBB sesuai dengan Pasal 1 Bab I Piagam PBB adalah memelihara keamanan dan perdamaian internasional, melakukan tindakan terhadap agresi atau yang melanggar perdamaian dan melakukannya dengan cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian situasi atau perselisihan internasional yang dapat mengarah kepada pelanggaran internasional. Disitu jelas bahwa Irak telah melanggar peraturan dan ketentuan Piagam PBB, oleh karena itulah PBB dan seluruh anggotanya yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan

⁹⁶ Lando, *opcit*, hal. 150

memelihara keamanan dan perdamaian internasional mengecam keras tindakan agresi Irak.

Upaya internasional yang dilakukan oleh negara-negara Arab terus dilakukan agar Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat. Namun dari beberapa pertemuan antara Irak dengan beberapa negara Arab, Irak akan mundur dari Kuwait apabila Israel mau mundur dari semua wilayah Arab yang diduduki sejak Perang Tahun 1967. Tawaran Irak itu ditentang keras oleh Amerika Serikat dan Inggris. Para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh internasional berupaya mempengaruhi Saddam Hussein agar mau mundur dari Kuwait namun usaha itupun gagal. PBB sebagai penanggungjawab keamanan dan perdamaian internasional melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi-resolusi damai untuk menekan Irak agar mau keluar dari Kuwait, namun Irak tidak mematuhi. Akibatnya diplomasi internasional dan upaya perdamaian PBB mengalami jalan buntu. Oleh karena itulah Dewan Keamanan PBB dengan dukungan dari Amerika Serikat mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat kepada Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka mengusir Irak dari Kuwait. Fakta ini menunjukkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dalam rangka menyelesaikan invasi Irak terhadap Kuwait.